

PEMIKIRAN POLITIK JAMAL AL-DIN AL-AFGHANI DALAM MERESPON DUNIA MODERN

Muhammadong

Universitas Negeri Makassar

Email : muhammadong74@yahoo.com

Abstrak

Jamal Al-din Al-Afghani merupakan tokoh pembaharuan dalam Islam abad kesembilan belas. Untuk memperkuat posisi umat Islam secara politis, Al-Afghani mengembangkan konsep pendidikan secara totalitas supaya warga tidak diperlakukan secara diskriminatif, maka konsep pendidikan yang dikembangkan adalah gerakan salafiyah yang pernah diajarkan oleh generasi terdahulu. Pan Islamisme yang digagas bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada warga supaya ikatan solidaritas dapat tercapai sehingga eksistensi dan kemandirian suatu Negara dihormati dan dihargai oleh Negara lain. Al-Afghani sangat mencela konsepsi Negara yang berprinsip otokratis dan berpaham bahwa raja mempunyai kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Pemimpin harus mengambil keputusan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat dalam keputusan itu supaya kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala Negara untuk tunduk terhadap Undang Undang dapat terlaksana. Naturalisme dan materialisme beragama bagi Al-Afghani tidak lebih hanya sekedar asumsi sehingga dapat mengarahkan umat Islam untuk berpikir kebendaan. Maka semangat dalam menjalankan ajaran Islam harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sehingga peluang untuk melakukan ijtihad tidak diwarnai dengan saling menyalahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.

Kata Kunci:

Pemikiran, Al-Afghani, Politik, Moderen

Abstract

Jamal Al-din Al-Afghani was a figure of renewal in nineteenth-century Islam. To strengthen the position of Muslims politically, Al-Afghani developed the concept of education in totality so that the concept of education developed was the salafiyah movement taught by previous generations. Pan Islamism which was initiated aims to give a sense of justice to the citizens so that the bond of solidarity can be achieved so that the existence and independence of a country is respected and valued by other countries. Al-Afghani strongly denounced the conception of an autocratic principle and held that the king had powerful in the government. The leader must make decisions in deliberation by involving the community in the decision so that freedom of opinion and the obligation of the head of state to submit to the Act can be implemented. Naturalism and religious materialism for Al-Afghani are no more just assumptions that can lead Muslims to think materially. So, the spirit in carrying out Islamic teachings must be guided by the Qur'an and Sunnah of the Prophet so that the opportunity to do ijtihad is not colored by blaming each other with one opinion.

Keywords:

Thought, Al-Afghani, Politics, Modern

Pendahuluan

Apabila memperhatikan perkembangan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 maka ditemukan perbedaan pemahaman dalam keagamaan. Hal itu disebabkan beberapa perspektif yaitu suasana agama dan suasana keberpihakan kepada organisasi keagamaan semakin menonjol. Gerakan keagamaan merupakan reaksi atau respon terhadap tantangan yang ada. Ia merupakan reaksi terhadap pemikiran Barat, sekularisme, komunisme, nasionalisme dan sebagainya. Masa itu, banyak permasalahan yang dihadapi namung tidak imbangi dengan ketersediaannya sumber daya manusia yang handal yang mempunyai waktu luang untuuk memikirkan kemajuan Islam. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan babak baru bagi kemajuan pemikiran yang dicapai oleh umat manusia, sehingga dengan kemajuan tersebut dapat memasuki semua aspek kehidupan dalam hal pemikiran keberagamaan. Hal demikian tidak hanya terjadi di dunia Barat sebagai basis modernism, akan tetapi juga merambah ke dunia Timur, termasuk dalam dunia Islam.¹

Sistem demokrasi pada masa sekarang perkembangannya sangat pesat sejalan dengan Proses globalisasi di hampir semua Negara dan Bangsa di dunia. Sistem demokrasi telah menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan sistem yang lain. Hal ini dapat dilihat dari segi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan pergantian kekuasaan secara damai penyelenggaraan perbedaan-perbedaan atau konflik secara beradab dan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan hampir semua Negara dengan Negara yang lain memiliki bentuk demokrasi yang variatif yang dapat menyesuaikan degan budaya pada setiap Negara supaya dapat menutup peluang masuknya demokrasi lain.²

Jatuhnya Mesir ke tangan Barat pada tahun 1800 M., demikian pula negara-negara dunia Islam lainnya, menyadarkan dunia Islam dan pemimpin-pemimpinnya akan kelemahannya, dan sekaligus membuka mata mereka akan kemajuan peradaban yang dicapai oleh Barat dan kelemahan pertahanan yang demikian. Hal demikian mendorong pemuka dan pemimpin-pemimpin negara dunia islam untuk meningkatkan

¹Muhammad Natsir, *Agama dan Negara: dalam Perspektif Islam* (Cet: 1 Juli 2003 Penerbit Media Da'wah, Jakarta), h.78

²Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokob dalam Sejarah Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 29.

mutu dan kekuatan serta pertahanan umat Islam untuk dapat meraih kembali kejayaannya.³

Kekalahan demi kekalahan yang dialami umat Islam dari dunia Barat yang disertai dengan kemajuan peradabannya, sehingga muncul pemahaman untuk menyatukan antara ajaran Islam dengan kemajuan teknologi yang sudah mengakar di masyarakat. Muncul pemahaman bahwa untuk menjauhkan umat Islam dari keterbelakangan sangat diperlukan adanya sinergitas antara globalisasi dengan paham keagamaan sehingga dimungkinkan tercapai dua dimensi yang menguatkan yaitu dimensi *ilahi* dan dimensi *wathaniyah*.⁴

Jamaluddin al-Afghani sebagai salah seorang pimpinan pembaharuan dalam Islam, lahir di Afganistan pada tahun 1897 M., dalam pemikiran pembaharuannya meyakini bahwa Islam adalah sesuai dengan semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Jika kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran; Islam dengan kondisi yang di bawa oleh perubahan zaman dan perubahan tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk interpretasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka lebar untuk dilakukan.⁵

Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh penting dan gerakan pembaharu dalam dunia Islam abad ke 19 M. Banyak kalangan yang senang dengan ide-ide pemikirannya tapi tidak sedikit yang menjadi lawan politiknya. Ia disenangi karena dapat membebaskan masyarakat dari belenggu ide-ide yang dilontarkan oleh Barat, namun ia juga dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa otoriter yang dapat menghambat peluang mereka untuk korupsi yang dapat membahayakan kekuasaan.⁶

Dalam percaturan politik, Jamaluddin Al-Afghani memegang peran penting dalam politik modern. Ia dikenal dalam dunia Islam Syiah dan Sunni terutama karena pengaruhnya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan obsolutisme penguasa-penguasa Muslim. Dalam gagasan politiknya, Jamaluddin Al-Afghani selalu menekankan persatuan supaya masyarakat kembali kepada panji-panji keislaman

³ Denohue, John D, dan John L. Esposito, *Islam dan pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machun Husein, Jakarta; Rajawali, 1984), h.56

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tato Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 124-125.

⁵ Alex, *Kamus Ilmiah Populer Internasional. Disertai Data dan Singkatan* (Surabaya: PT. Alfa, t.th.), h. 233 dan 255.

⁶ Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam*, Cet. III (New York: Octagon Books, 1978), h. 68.

kemudian dalam gagasan politiknya dikenal nama Pan Islamsme. Ia selalu mengajarkan bahaya imperialisme yang dikembangkan oleh dunia Barat dapat mengancam ajaran agama khususnya bagi umat Muslim. Untuk membebaskan diri dari pengaruh mereka, maka perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya tanpa mengabaikan peran ijtihad supaya kebebasan dalam berpendapat selalu perpedoma kepada Al-Qura'an dan Sunnah Nabi saw.⁷

Pembahasan

Riwayat Politik Al-Afghani

Nama lengkap Al-Afghani adalah Sayyid Jamal al-Din al-Afghani bin Shafdar Al-Husaini yang lahir pada tahun 1835 M.⁸ Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh penting penggerak pembaruan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Dalam hidupnya, ia mendapatkan banyak tantangan karena cara berpikirnya yang sering berbeda haulan dengan penguasa sehingga tidak sedikit yang memusuhinya namun banyak juga yang berpihak dengannya karena selalu membela warga.⁹

Sebagai penganut mazhab Hanafi, Al-Afghani memegang peran politik sangat penting dalam gerakan politik Islam modern bahkan ia dikenal luas dalam dunia Syiah dan Sunni serta pengaruhnya dalam pengembangan keislaman di dunia moderen. Perhatiannya yang serius terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutism penguasa-penguasa Muslim memberi semangat baru untuk membela warga melalui melalui pemurnia ajaran-ajaran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw sehingga Al-Afghani tidak menutup mata untuk melakukan ijtihad dalam rangka mengembangkan ajaran Islam tanpa menonjolkan perbedaan.¹⁰

Asal usul Al-Afghani kerap kali diperdebatkan dikalangan ahli. Diantara asal usul yang menonjol dari kepribadian beliau adalah karena berasal dari keturunan Rasulullah dan darahnya bercampur dengan darah Arab. Sedangkan kalangan Syiah mengklaimnya sebagai warga Iran berkebangsaan Persia. Al-Afghani dilahirkan di Asadabad sekitar wilayah Iran dan bukan berkebangsaan Afghanistan seperti yang dikatan sebagaian ahli karena istilah Al-Afghani yang didekatkan namanya. Sejak kecil

⁷*Ibid.*

⁸ Bernard Lewis, et.al., *The Encyclopedia of Islam*, jilid II (Leiden: E.J Brill, 1965), h. 417

⁹ Dewan Redaksi, *Eksiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), h. 507.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *The Reconstrution thought in Islam*, Edisi II (London; Oxford University, 1934), h.

Al-Afghani menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, filsafat Islam dan Bahasa Arab.¹¹

Berbagai fitnah sering kali dilontarkan kepada sehingga terpaksa harus meninggalkan Turki dan mulai menatap kehidupan baru di Mesir. Bahkan berbagai Negara Eropa sering didatangi dalam rangka membentuk wawasan kehidupan yang lebih maju. Dengan modal pengalaman dan pemahaman keagamaan yang mendalam, Al-Afghani membuat terobosan dalam dalam mengembangkan paham keagamaan supaya umat Islam tidak terpaku pada doktrin dan paham taklid yang dapat menyebabkan Islam dipahami secara kaku sehingga perlu dilakukan ijtihad lebih luas yang bersumber dari ajaran Al-qur'an dan hadis.¹²

Gagasan Politik Al-Afghani

Dari berbagai pengembaraan di Negara-Negara Islam yang dilakukan, ternyata Al-Afghani menemukan pengalaman pahit yang mengharuskan melakukan perubahan yaitu dunia Islam sangat didominasi dengan pemerintahan yang otokratisme dan absolutisme. Pemerintah seakan menjalankan kekuasaan tanpa ada kontrol dari konstitusi yang dapat merusak berbagai sistem dan tatanam yang tentunya dapat merugikan warga secara umum dan umat Islam secara khusus. Bahkan pemerintah tidak mau membuka diri dalam melakukan musyawarah pada level pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang diambil dapat memperkuat posisi pemerintah.¹³

Gagasan yang diambil oleh Al-Afghani banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan orientasi pemikiran yang lebih baik. Al-Afghani menilai bahwa kekuatan suatu Negara hanya bisa kokoh apabila masyarakat dapat bersatu. Menurutnya imperialism bangsa-bangsa Barat sangat berbahaya dan mengancam umat Islam. Penyakit absolutisme dan despotisme dapat menggerogoti masyarakat sehingga tidak mampu bangkit dari penjajahan. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit itu, umat Islam selalu berpikir mundur bahkan lebih percaya kepada *bid'ah*, *takhayul*, serta *khurafat*.

¹¹ Ahman Amin, *Za'ama al-Islab fi Al-Asyr al-Hadits* (Cairo: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah, 1979), h. 63.

¹²Harun Nasution, *pembaruandalam Islam; sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang. 1975), h52.

¹³*Ibid.*

Untuk mengobati penyakit ini, Al-Afghani menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi dan perombakan terhadap pemerintahan kolonialisme dan imperialisme Barat. Disamping itu, Al-Afghani berusaha memperbaiki aqidah umat Islam yang sudah rusak dengan cara kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Menurutnya, penyimpangan terhadap aqidah membuat umat Islam menjadi umat yang terkesampingkan dan tidak dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Untuk mewujudkan umat yang maju, maka diperlukan ketegasan dalam menjalankan agama supaya terbebas dari otoritarianisme penguasa dan kolonialisme bangsa-bangsa lain.¹⁴

Tujuan yang ingin dicapai dari imperialisme Barat bukan hanya ingin menguasai pemerintahan menjadi absolutisme, akan tetapi lebih jauh dari itu, mereka ingin merubah keyakinan masyarakat menjadi materialisme. Maka Al-Afghani mendorong umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang benar dan membangkitkan kesadaran umat Islam supaya dapat mengeyahkan pemerintahan otoriter dan kolonialisme yang berdiri dibelakangnya. Bahkan ia menyeru kepada umat Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam paham Pan Islamisme.¹⁵

Gerakan pemikiran Al-Afghani selalu berorientasi pada *salafiah* untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Menurutnya, umat Islam harus meneladani orang-orang terdahulu seperti pada masa kejayaan al-khulafa al-rasyidun karena mereka murni menjalankan ajaran agama tanpa mencampur dengan paham *khurafat* yang dapat merusak aqidah umat Islam. Namun demikian, Al-Afghani tidak menafikan keunggulan Barat terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengatasi keunggulan tersebut, maka umat Islam perlu belajar dari Barat supaya dapat mengembalikan kejayaan umat Islam seperti dahulu kala. Gerakan *salafiyah* yang dicetuskan Al-Afghani tidak lebih dari sekedar ingin mengembalikan kejayaan umat Islam dalam menjalankan agamanya. Al-Afghani tidak menghendaki umat Islam hanya sekedar bertaqlid tanpa mengetahui sumber ajarannya yang pada akhirnya mereka

¹⁴ Elihami, *Keislaman*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 113.

¹⁵ H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam*, (Cet, III; New York: Octagon Books, 1978), h. 50. Lihat juga Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Kajian Politik Islam Liberal, Sejarah, Konsep, Penyimpangan dan Jawaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 59.

menjadi umat terbelakang karena meninggalkan sumber utama dari ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.¹⁶

Al-Afghani menyerukan supaya demokrasi kerakyatan diterapkan di Mesir supaya pemerintahan dapat berjalan berdasarkan dengan konstitusi. Demokrasi kerakyatan merupakan perwakilan rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat yang anggotanya terdiri dari pilihan rakyat. Bagi Al-Afghani sangat tidak percaya dengan pemerintahan dibawah kekuasaan Asing. Sebab semua kepentingannya akan selalu berpihak kepada penguasa bukan berpihak pada rakyat bahkan kekuasaan dapat menjadi alat politik mereka untuk mendapatkan keinginannya. Maka gagasan pemerintahan rakyat merupakan solusi yang ditawarkan oleh Al-Afghani memperbaiki situasi supaya semakin kondusif supaya kekuasaan absolutisme dapat dilawan. Pemerintahan yang berorientasi pada kerakyatan akan memberikan keadilan kepada warga yang dapat mengatur tata kehidupan mereka secara damai.¹⁷

Al-Afghani menyadari bahwa kelemahan umat Islam karena mudah terpecah belah sehingga Barat menemukan celah untuk mengambil kejayaan umat Islam. Maka usaha yang dilakukan adalah mengajak mereka supaya melakukan perbaikan secara internal, menghimpung kekuatan serta megadopsi peradaban yang dimiliki oleh Barat. Alasan Al-Afghani bangkit memperbaiki suasana yang tidak kondusif tersebut karena sistem pemerintahan yang terjadi tidak memberikan rasa keadilan kepada warga, sehingga berpeluang menjadi Negara despotik. Maka suatu kewajaran kalau Negara Timur tidak menyatu untuk memberikan kebaikan dan pencerahan kepada warganya karena disebabkan oleh Negara Barat masih mengikat sistem pemerintahan yang terjadi di Negara-Negara Timur.¹⁸

Wacana Pan Islamisme

Pan Islamisme atau biasa disebut dengan solidaritas umat Islam merupakan ide yang sangat menarik yang dicetuskan oleh Al-Afghani. Ide ini muncul karena Al-Afghani melihat adanya perpecahan yang timbul dikalangan umat Islam karena akibat persoalan *khilafiyah*. Umat Islam harus bangkit dari penjajahan sehingga dibutuhkan

¹⁶ Sehat Sultoni Dalimunthe, *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Islamic Studies* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 95.

¹⁷ P.M. Holt et.al., *The History of Islam* (New York: Cambridge University Press, 1970), h. 642.

¹⁸ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaruandalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1998), h. 77.

persatuan dikalangan mereka. Umat Islam di dunia khususnya di Timur harus bersatu supaya dapat menumbuhkembangkan tanggungjawab dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jangan hanya karena persoalan perbedaan pendapat umat Islam harus terpecah. Diantara contoh yang dikemukakan Al-Afghani adalah kasus Sunni dan Syiah yang sampai detik ini tidak bisa dipersatukan akibat karena hanya perbedaan pemahaman.¹⁹

Ide Pan Islamisme bagi Al-Afghani sebenarnya bukan konsep baru, karena tokoh-tokoh Sunni dan Syiah sudah lebih dahulu mewacanakan, hanya saja mereka tidak berhasil dipersatukan dengan konsep tersebut karena idealisme yang sudah mengakar diantara mereka dan sulit untuk dirubah lagi. Maka ide yang ditawarkan oleh Al-Afghani, umat Islam harus melakukan perbaikan secara internal dan mampu mewujudkan kemandirian ditengah arus globalisasi ditengah persaingan yang begitu ketat. Pan Islamisme yang digagas Al-Afghani sebenarnya bukan hanya mengajarkan warga untuk bersatu dalam menjalankan agamanya. Akan tetapi lebih dari itu Pan Islamisme dicetuskan supaya dapat menyusun kekuatan untuk mewujudkan kemandirian dalam bernegara dalam rangka melawan kolonialisme Barat. Al-Afghani tidak menghendaki umat Islam menjadi budak di Negeranya sendiri bahkan beliau sangat mengecam penjajahan karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Al-Afghani menghendaki hubungan antar Negara terjalin secara harmonis supaya dapat melakukan kerjasama diberbagai bidang. Untuk melawan penjajah, perlu ada ikatan persatuan tanpa memandang segala perbedaan.²⁰

Ketika berada di Mesir, Al-Afghani merasa prihatin melihat kondisinya yang terburuk, rakyat hidup miskin sedang kekayaan alam belimpah ruah, ekonomi dikuasi oleh Barat. Dengan penuh kesadaran, Al-Afghani bangkit dan tekun melakukan kampanye bahwa warga sekarang sedang dieksploitasi dengan Barat sehingga sulit melakukan perbaikan. Untuk mengembalikan kondisi yang lebih baik, warga harus berjuang supaya hak-haknya dapat dikembalikan. Al-Afghani menilai bahwa Pan

¹⁹John D. Donohue dan John L. Espotio, *Islam dan pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: Rajawali, 1984), h.25.

²⁰ Mohammed 'Abed al-Jabiri, *Arab-Islamic Philosophy: a Contemporary Critique*, Terj. Moch Nur Ichwan, "*Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam*" (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 9.

Islamisme sebenarnya bukan orientasi keagamaan akan tetapi membangun peradaban supaya Negara-Negara Islam dapat bangkit kembali.²¹

Dalam perjalanannya, Pan Islamisme yang digagas oleh Al-Afghani ternyata hanya sekedar wacana karena ide dan gagasan tersebut tidak pernah terimplementasi dalam tatanam bernegara dan beragama. Namun demikian, pengaruhnya sangat meluas dikalangan umat Islam. Buktinya, gagasan pan Islamisme mampu melahirkan paham fundamentalisme sehingga umat Islam dapat melawan sikap taqlid dan jauh dari bayang-bayang dogmatis serta kejumudan yang dapat merusak tatanam beragama umat Islam. Al-Afghani ingin ingin membuka pikiran umat Islam supaya tidak terjebak dengan doktrin dan paham tradisional. Pikiran yang bersifat rasional sangat dibutuhkan untuk membuka pintu kebuntuan sehingga peluang untuk melakukan ijtihad masih terbuka dan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan.²²

Ayat-ayat Al-Qur'an bagi Al-Afghani perlu diinterpretasi secara luas supaya dapat menemukan maknanya secara global. Dogmatis dan ritual yang selama ini dilakukan oleh warga harus distrikan supaya mereka kembali eada ajaan yang sebenarnya. Berdasarkan pandangan inilah maka dapat disimpulkan bahwa Al-Afghani sebenarnya menganut paham modernism dan fundamentalisme. Diantara ciri fundamentalisme yang dapat dikemukakan adalah:

1. Penafsirannya selalu cenderung refresif sehingga segala bentuk yang dicapai berkekuatan absolut.
2. Dalam mewujudkan tatanam bernegara, pandangannya selalu cenderung teokrasi sehingga dibutuhkan penyatuan antara agama dan Negara.
3. Paham fundamentalisme sangat menolak sistem kafitalisme Barat sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat.
4. Paham fundamentalisme sangat sejalan dengan gagasan pan Islamisme bahwa untuk mewujudkan Negara yang berkeadilan maka sangat dibutuhkan persatuan dikalangan umat Isam.²³

²¹Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious thought in Islam* (London: Oxford University, 1934), h.92.

²²Arkoun, M. dan Louis Gardet, *Al-Islamul-'Amsu wa Islamul-Ghad*, Terj. Ahsin Mohammad "Islam Kemarin dan Hari Esok" (Bandung: Pustakan, 1997), h. 24.

²³*Ibid.*

Gagasan Pan Islamisme oleh Al-Afghani ternyata mendapat sambutan positif dikalangan warga termasuk pemerintah Usmani di Turki. Karena lebih menyukai menjadi Ulama daripada politisi, Al-Afghani lebih banyak mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan dan dapat melahirkan ilmuwan terkenal yaitu Muhammad Abduh. Ketertarikan Muhammad Abduh kepada Al-Afghani karena ide-ide pikirannya banyak bersifat rasional dan filosofis. Teori-teori pendidikan yang digagas Al-Afghani tidak lebih dari harus merespon situasi itu sehingga menuntut adanya perubahan secara menyeluruh diberbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial dan keagamaan. Gagasan Pan Islamisme oleh Al-Afghani bukan berarti menyatukan semua kerajaan-kerajaan Islam akan tetapi lebih menekankan pada aspek persatuan yang harus dijalin oleh umat Islam karena sendi kejayaan Islam ada aspek solidaritas.²⁴

Konsep Negara

Al-Afghani selalu mengkampanyekan konsep Republik dalam sistem ketatanegaraan karena sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis yang dikandung didalamnya. Oleh sebab itu, beliau tidak pernah merespon sistem kekuasaan yang bersifat mutlak atau absolut karena tidak mencerminkan nilai-nilai kerakyatan bahkan lebih cenderung pada kepentingan kekuasaan. Dalam konsepnya, seyogyanya pemerintah harus menjalankan permusyawaratan dalam mengambil keputusan supaya semua stakeholder dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Untuk menghargai hak-hak individu, maka diperlukan satu majelis untuk memusyawarakan segala aspek persoalan yang dihadapi masyarakat (semisal Majelis Permusyawarata Rakyat di Negara Indonesia). Dengan demikian, maka rakyat sangat berdaulat untuk menyuarakan aspirasinya melalui perwakilan tersebut. Rakyat dapat bebas mengeluarkan pendapatnya dan pemimpin tunduk pada konstitusi.²⁵

Dalam sistem Republik yang digagas oleh Al-Afghani, Undang-Undang atau hukum menjadi rujukan utama dalam bernegara. Pemerintah harus menjalankan Undang-Undang dan harus tunduk dan patuh kepadanya. Sistem seperti ini tidak membuat jurang pemisah antara Rakyat dan pemerintah. Rakyat dan pemerintah sama

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 59.

²⁵ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 71.

statusnya dihadapan hukum dan tidak ada yang diskriminatif supaya hak asasi manusia dapat ditegakkan berdasarkan konstitusi. Bagi Al-Afghani, kekuasaan hanya dapat diperoleh melalui kedaulatan rakyat, maka sangat demokratis jika pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Seolah-olah pemikiran seperti ini sangat menafikan sistem kekhalifaan yang sudah lama terbangun pada masa kejayaan Islam dahulu. Namun demikian, Al-Afghani selalu berpegang pada prinsip kemashlatahan dalam mengemukakan gagasannya sehingga ide-ide tersebut mendapatkan perhatian di mata rakyat.²⁶

Demokrasi yang dianut oleh Al-Afghani selalu mengacu pada demokrasi kerakyatan sehingga absolutisme dan otokratisme mejadi musuh utama dalam sistem pemerintahan. Rakyat harus diajari berdemokrasi, rakyat tidak boleh tinggal diam hanya sekedar menerima keputusan yang telah ditetapkan, keterlibatan rakyat harus menjadi domain dalam pengambilan keputusan supaya konstitusi dapat dihargai. Absolutisme dan otokratisme bagi Al-Afghani cenderung melukai hati rakyat karena meniadakan hak-hak individu serta bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat, maka rakyat dapat memberi saran kepada pemerintah yang terkait kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga tersebut harus orang-orang yang bisa dipercaya yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat bukan aspirasi atau kepentingan pemerintah yang cenderung otokratis.²⁷

Dengan memperhatikan cara berpikir Al-Afghani tersebut, maka dapat diambil suatu natijah bahwa gagasan tersebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Namun demikian, Al-Afghani sudah melangkah lebih jauh karena ternyata mendapat respon dunia Islam khususnya dalam menerapkan sistem pemerintahan Republik. Untuk menembus penetrasi Barat dan kekuasaan Turki Usmani, Al-Afghani berani mengambil resiko untuk mengemukakan gagasannya dalam rangka memberi kebaika bersama dikalangan umat Islam karena keadaan yang menuntut demikian. Umat Islam mundur akibat sistem pemerintahan yang tidak berdauat sehingga segala keputusan dan dan kebijakan diambil oleh pemerintah hanya untuk mengokohkan kekuasaannya. Ternyata

²⁶ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 47.

²⁷*Ibid.*

sistem demokrasi yang digagas oleh Al-Afghani lebih mendapat respon di mata rakyat dibanding ide Pan Islamisme yang tak kunjung terealisasi.²⁸

Terhadap hal ini, Sir Muhammad Iqbal mengemukakan kritiknya bahwa seandainya Jamal al-Din "yang tidak mengenal lelah itu tidak membagi bagi energinya dan membagikannya secara utuh untuk kepentingan Islam sebagai system Agama dan tingkah laku manusia, katakanlah secara intelektual pada saat sekarang pasti akan lebih kuat berakar"²⁹ Namun bagi Gibb—berbeda dengan Iqbal—jika, seperti terlihat dari konteks di atas, dia maksudkan bahwa Jamal al-Din adalah orang yang dengan "pandangannya yang mendalam menjangkau makna sejarah pemikiran dan kehidupan umat muslim" pasti mampu "memikirkan kembali seluruh ajaran Islam", maka saya tidak setuju dengannya. Menurutnya, belum tiba saatnya untuk "memikirkan kembali." Tugas pertama dan paling mendesak, dan persyarat esensial untuk "memikirkan kembali seluruh ajaran Islam itu," adalah mengembalikan Islam ke atas landasan-landasan lamanya yang tangguh, sehingga "semangat baru" yang dikemukakan oleh Iqbal itu dapat berfungsi dengan prinsip-prinsip yang jelas, tepat dan bebas dari segala campuran.³⁰

Naturalisme dan Materialisme

Sebagai tokoh politik, Al-Afghani dikenal juga banyak memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam mengembangkan ajarannya. Al-Afghani tidak mau terjebak kedua kalinya dalam sistem penjajahan Barat yang mengakibatkan umat Islam mengalami kemunduran. Bagai kalangan Barat, salah satu cara untuk mengelabui umat Islam dari ajarannya maka dikembangkanlah paham naturalisme dan materialisme. Namun dalam paham tersebut sangat ditentang oleh Al-Afghani karena dapat merugikan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Umat Islam harus dimurnikan aqidahnya dengan ajaran tauhid dan jangan terjebak

²⁸ Esposito, John L., *Islam and Politics*, Terj. H.M. Joesoef Sou'yb, "*Islam dan Politik*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 10.

²⁹ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious thought in Islam* (London: Oxford University, 1934), h. 92.

³⁰ H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam* (New York: Octagon Books, 1978), h. 50. Gibb kemudian mengemukakan bahwa satu-satunya buku Jamal al-Din yang diterbitkan, *The Refutation of the materialist*—yang aslinya berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dengan judul *al-Radu 'ala al-Dohriyyin*—bagaimana juga tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan intelektual seperti yang diduga Iqbal.

dalam *khurafat* atau *tahayyul*. Ajaran tauhid harus diutamakan diatas segala-galanya karena dengan cara seperti itulah supaya dapat mengesakan Allah swt.³¹

Dalam perjalanannya, Al-Afghani menganut tiga teori paham keagamaannya yang dapat mensinkronkan antara kedudukan manusia dengan perilakunya yaitu melalui ketenangan jiwa, menjaga perasaan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ketiga aspek tersebut tentunya sangat bertentangan dengan paham atheisme yang dikembangkan oleh Barat yang dapat menghancurkan ajaran Islam. Karena menurutnya bahwa untuk memecah belah umat Islam jalan yang ditempuh adalah dengan cara memalingkan dari ajarannya sehingga mereka menjauh dari agamanya.³²

Bagi Al-Afghani, Naturalisme dan materialism tidak lebih dari hanya ingin menjadikan umat Islam menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang menuruti keinginan penjajah dan kelompok yang ingin menjadi oposisi. Kedua kelompok ini sebenarnya bertentangan dengan semangat perjuangan Al-Afghani yang menghargai prinsip ketaatan dalam pemerintahan berdasarkan konstitusi. Diantara kekurangan ajaran atheisme yang mengakar dimasyarakat karena sudah jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi atheis kejujuran merupakan kemungkinan yang tidak terjadi dalam kehidupan sehingga kehidupan dalam paham atheis harus dijalani seperti apa adanya tanpa pertimbangan agama. Dalam pahamnya, atheis tidak lebih dari mengorbankan kesetiaan dan kesatriaian. Karena kedua pahan ini membawa umat Islam kepada keinginan yang tidak terbatas.³³

Penolakan Al-Afghani kepada naturalism dan maeterialisme karena didorong semangat keagamaan yang dimiliki dalam dirinya dan keperpihakannya kepada masyarakat dalam menjalankan agamanya. Bagi Al-Afghani, kekokohan suatu Negara apabila masyarakat mampu menjalankan agamanya dengan baik. Agama dan Negara tidak bisa dipisah karena satu kesatuan yang tidak mungkin terwujud apabila berjalan sendiri-sendiri. Al-Afghani selalu mengingatkan bahaya paham atheis karena merusak sendi-sendi aqidah. Atheis tidak lebih dari penginkaran terhadap sang pencipta karena memiliki pandangan yang keliru. Atheis membuat umat Islam kacau pikiran dan hatinya

³¹Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 60.

³² Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Islam*, (Cet. I; Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 95.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1994), h. 7.

gelap karena selalu diliputi dengan kebendaan yang bisa menguasai manusia dalam hidupnya. Disamping itu, muncul doktrin dalam paham atheis bahwa jasmani manusia hanya diliputi unsur-unsur materi yang tidak perlu disuplai kesegaran jiwa.³⁴

Pemikiran Modernisme

Sebagai penggagas modernisme, Al-Afghani menghendaki suatu peradaban harus dapat memfilter model yang diterapkan oleh Eropa dan Barat dan jangan mudah mencontoh model keduanya karena Islam bukan ajaran yang dapat diimpor. Modernisme jangan hanya lahir dari dunia Barat akan tetapi dapat memunculkan modernisme dikalangan Islam. Al-Afghani menghendaki modernisme tidak lahir dari kalangan Barat sekalipun banyak yang mengadopsi modernisme Barat akan tetapi modernism lahir dari umat Islam itu sendiri. Dalam mempertahankan peradaban Islam, emperisme dan rasionalisme harus digandeng secara bersamaan karena hanya paham keduanya yang dapat mendekati kepada modernisme dalam ajaran Islam.³⁵

Bagi Al-Afghani, wacana untuk mengembangkan modernisme sudah sangat urgen diterapkan, mengingat karena melihat kondisi umat Islam yang tidak menggembirakan saat ini sehingga perlu melakukan perubahan secara fundamental. Munculnya sikap inferioritas umat Islam menjadi bukti kuat bahwa kolonialisme dan imperialisme Barat masih mendominasi peradaban dunia. Gerakan modernisme bagi Al-Afghani tidak jauh beda dengan furitanisme yaitu suatu gerakan untuk kembali kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sehingga apabila ditemukan paham yang bertentangan dari kedua sumber tersebut maka dinggap sesat dan dapat membahayakan umat Islam.³⁶

Modernisme bagi Al-Afghani tidak lebih dari perubahan budaya akibat kemajuan teknologi yang dihadapi. Tantangan besar yang dihadapi umat Islam sekarang adalah mewujudkan kemandirian dalam beragama tanpa adanya intervensi dari Barat. Sebuah kematangan dalam berpikir sangat dibutuhkan supaya tidak terjebak dalam postmodernisme. Oleh karena itu, untuk mewujudkan modernisme dalam ajaran Islam,

³⁴Maryam Jamilah, *Islam and Orientalism*, Terj. Machnun Husein, "*Islam dan Orientalisme*" (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 69.

³⁵Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Terj. Osman Raliby, "*Membangun Kembali Alam Pikiran Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 6.

³⁶Abd Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS printing Cemerlang, 2013), h. 116.

maka aspek pengamalannya harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan karena Islam bersifat universal yang dapat dipersesuaikan dengan keadaan.³⁷

Penutup

Sebagai tokoh reformis, Al-Afghani selalu bercita-cita melakukan perubahan baik dalam sistem ketatanegaraan maupun dalam paham kegamaan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umat Islam. Al-Afghani tidak menghendaki adanya warga tertindas dengan pemerintahan otoriter yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, beliau membuat gagasan supaya warga dapat menemukan kedamaian dalam bernegara. Sistem musyawarah selalu beliau dengungkan supaya warga dapat memberi sumbang saran kepada pemerintah. Menurut Al-Afghani bahwa pemerintahan yang efektif apabila pemerintah selalu bekerja sama dengan rakyatnya supaya terjadi *take and give*. Mewujudkan keadilan bagi Al-Afghani menjadi harga mati dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat dikontrol oleh rakyatnya supaya tidak terjadi pemerintahan yang absolut. Karena sistem peemrintah yang tidak mendapat pengawasan akan membawa kepada paham materialsme dalam bernegara yang akibatnya pemerintah dapat berbuat sewenag-wenang kepada warganya.

Gagasan pemikiran dan pembaharuan Al-Afghani selalu mendapat respon dikalangan umat Islam. Bukan karena keperpihakannya kepada mereka akan tetapi lebih jauh, Al-Afghani menghendaki supaya umat Islam dapat lebih maju seperti kemajuan Erofa dan Barat. Maka tidak tidak heran kalau Al-Afghani menolak keras sistem kafitalisme dalam beragam karena hanya membawa umat Islam kepada paham *taqlid* yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Afghani menghendaki pembaharuan pemikiran berasal dari kalangan umat Islam sehingga ruang gerak Barat dapat dibatasi. Maka sistem yang diterapkan adalah membuka jalan ijtihad supaya dapat mengembangkan ajaran Islam. Untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, Al-Afghani mengembangkan konsep *salafiyah* seperti yang pernah diterapkan oleh al-khulafa' al-rasyidun supaya umat Islam kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.

³⁷*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jabiri, Mohammed ‘Abed. *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Alex. *Kamus Ilmiah Populer Internasional. Disertai Data dan Singkatan*. Surabaya: PT. Alfa, t.th.
- Amin, Ahman. *Za’ama al-Ishlah fi Al-Asyr al-Hadits*. Cairo: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah, 1979.
- Amin, Husayn Ahmad. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arkoun, M. dan Louis Gardet. *Islam Kemarin dan Hari Esok*. Bandung: Pustakan, 1997.
- Asmuni, Yusran. *Dirasah Islamiah Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaruandalam Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Black, Anthony. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi HINGGA Kini*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Dalimunthe, Sehat Sultoni. *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Islamic Studies*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Denohue, John D. dan John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopdi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Elihami. *Keislaman*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*, Terj. H.M. Joesoef Sou’yb. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Gibb, H.A.R. *Modern Trends in Islam*. New York: Octagon Books, 1978.
- Holt, P.M. et.al. *The History of Islam*. New York: Cambridge University Press, 1970.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. *Kajian Politik Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawaban*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Terj. Osman Raliby. *Membangun Kembali Alam Pikiran Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Jamilah, Maryam. *Islam and Orientalism*, Terj. Machnun Husein. “*Islam dan Orientalisme*”. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Lewis, Bernard, et.al. *The Encyclopedia of Islam*, jilid II. Leiden: E.J Brill, 1965.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Natsir, Muhammad. *Agama dan Negara: dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 2003.
- Redaksi, Dewan. *Eksiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedi Islam III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1994.
- Rusli, Ris'an. *Pemikiran Teologi Islam*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tato Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soebahar, Abd Halim. *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS printing Cemerlang, 2013.